

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara India adalah negara berkembang dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang banyak dan setiap hari semakin bertambah. Negara India diharuskan untuk dapat memenuhi keamanan pangan agar dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduk. Negara India dikenal sebagai negara penghasil beras, gandum, tebu, kacang tanah, sayuran, buah, dan kapas terbesar kedua di dunia. Dengan hasil bumi yang melimpah menjadikan negara India menempati posisi ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina, menghasilkan senilai 2,1 triliun Dollar.¹

Meskipun negara India memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, namun tidak dipungkiri bahwa negara India masih harus menghadapi berbagai permasalahan mendasar seperti kemiskinan dan kelaparan. Sejak negara India merdeka pada tahun 1947, kebijakan mengenai agrikultur di negara India dapat mengurangi kelaparan, krisis pangan, hingga kemiskinan secara pesat.² Strategi agrikultur yang berkelanjutan dalam keamanan pangan negara India dapat mempertahankan negara India dari krisis pangan global bahkan pada saat negara India terkena dampak dari krisis pangan sekitar tahun 1960-an serta pada

¹ Food and Agriculture Organization of the United Nations. *FAO in India : India at a Glance*. N.D. <http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/> (Accessed August 18, 2020).

² Shabd S. Acharya. *Food Security and Indian Agriculture : Policies, Production Performance and Marketing Environment*. Agricultural Economics Research Review 22,no. 1. 2009. <http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aerr&volume=22&issue=1&article=001> (Accessed August 18, 2020). Hal. 1.

saat awal mula muncul globalisasi dan liberalisasi ekonomi sekitar awal tahun 1990-an. Tidak hanya krisis pangan saja, negara India juga mengalami dampak peningkatan harga pangan secara global yang cukup signifikan sehingga semakin memperparah jumlah kelaparan pada akhir tahun 2006.³

Faktor cuaca yang tidak menentu serta tingginya permintaan bahan pangan seperti gula, jagung, dan minyak sawit untuk digunakan sebagai bahan bakar menjadi salah satu penyebab peningkatan harga pangan. Selain itu pembatasan ekspor yang dilakukan oleh beberapa negara, penyetakan bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh importir besar, masuknya para investor baru dalam komoditas pertanian, semakin memperparah kenaikan harga pangan secara global. Sejak krisis pangan serta bencana kekeringan melanda negara India, maka negara India memutuskan untuk tidak lagi bergantung pada impor bahan pangan dan fokus swasembada pangan. Strategi keamanan pangan yang digunakan oleh negara India pada masa itu berfokus pada peningkatan produksi biji-bijian.⁴

Liberalisasi perdagangan multilateral di bawah naungan Perjanjian Putaran Uruguay dan negosiasi WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif dari perdagangan internasional.⁵ Meskipun memasuki tahun 1990-an Negara India mengubah sistem perdagangan yang semula unilateral menjadi multilateral, namun diketahui negara India menjadi salah satu negara yang memiliki struktur tarif impor paling ketat diantara negara berkembang lainnya.

³ *Ibid*, Hal. 2.

⁴ *Ibid*, Hal. 3.

⁵ Rajesh Chadha, et.al. *Computational Analysis of the Impact on India of the Uruguay Round and the Forthcoming WTO Trade Negotiations*. Working Paper no. 312. 2000. Hal. 1.

Negara India tercatat menjadi salah satu anggota pendiri dari GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) pada tahun 1947 dan setelah itu menjadi WTO (*World Trade Organization*) pada tahun 1995.⁶ Maka dari itu hal ini menjadikan negara India secara otomatis termasuk dalam kategori *Most Favored Nation* (MFN) serta mendapatkan perhatian khusus dari semua anggota WTO seperti dalam segala kegiatan ekspor begitupun sebaliknya. Most Favored Nations dapat dimaksudkan setara, yang berarti bahwa negara-negara dapat berdagang tanpa adanya diskriminasi, negara berkembang diberi akses pasar khusus pada perdagangan.⁷ Hal ini memudahkan negara India untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam agrikultur pada domestik maupun kegiatan ekspor.

Pada Putaran Uruguay menghasilkan komitmen untuk peningkatan tarif oleh negara-negara berkembang.⁸ Negara India memberikan perbedaan tarif lebih tinggi pada sektor pertanian dan barang mentah dibandingkan dengan sektor lain. Perjanjian mengenai pertanian (*Agreement of Agriculture*) WTO merupakan salah satu dari banyak perjanjian yang dinegosiasikan selama Putaran Uruguay.⁹ *Agreement of Agriculture* berisi ketentuan pada 3 bidang luas kebijakan pertanian dan perdagangan yaitu akses pasar, dukungan domestik, serta subsidi ekspor.

⁶ *Ibid*, Hal. 17.

⁷ WTO. *Principles of the Trading System*. N.D.

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm. (Accessed June 6, 2021).

⁸ Rajesh Chadha, et.al . Loc. Cit.

⁹ Ministry of Commerce and Industry, Government of India. *WTO Agreement on Agriculture : India & World Trade Organization (WTO)*. N.D.

<https://commerce.gov.in/PageContent.aspx?Id=126#b1> (Accessed September 15, 2020).

Dalam *Doha Development Agenda* (DDA) yang diluncurkan pada 2001 berfokus untuk mencapai perbaikan besar dalam bidang pasar pertanian.¹⁰ Bagi negara-negara berkembang, ikatan pra-Doha dapat dilampaui sampai 15 persen dari tarif awal yang hanya mengikat 2-6 persen. Pada putaran Doha memberlakukan beberapa komoditas pertanian sebagai “produk khusus” yang dikenakan pemotongan tarif lebih rendah atau tidak sama sekali berdasarkan pertimbangan bagi keamanan mata pencaharian. Paket Bali yang dilaksanakan pada Desember 2013 menjadi terobosan baru bagi WTO sejak diselenggarakannya Doha Development Agenda pada 2001.

Paket Bali 2013 dalam bidang agrikultur mencakup beberapa isu penting yang dibahas seperti penyimpanan stok pangan untuk tujuan keamanan pangan, pengelolaan kuota tarif (*Tariff Rate Quota*), kompetisi ekspor, dan kapas (bagi empat negara yaitu Benin, Burkina Faso, Chad, dan Mali).¹¹ Pada penyimpanan stok pangan, karena agrikultur di negara-negara berkembang kurang maka mengakibatkan fluktuasi harga sehingga banyak negara berkembang berfokus pada stok pangan untuk melindungi produsen maupun konsumen. *Tariff Rate Quota* membantu untuk mengakses pasar dan produksi dalam negeri, sehingga eksportir yang mengekspor produk tertentu dikenakan kuota tarif sedangkan bagi negara yang menggunakan TRQ, maka tarif ekspor tersebut akan diturunkan jika

¹⁰ N.A. Mancheri. *Doha Round Dilemmas: What Stakes India holds in the WTO*. Socio-economic Voices, 1-20. 2011. <http://eprints.nias.res.in/875/1/2011-Mancheri%20Nabeel%20-Socio-%20economic%20voices.pdf> (Accessed September 17, 2020). Hal. 2.

¹¹ A. Jatkar & C. Mukumba. *Unpacking The Bali Package, A Snapshot of the Bali Ministerial Decisions of the WTO Members* (8-9). CUTS International Discussion Paper. 2014. http://www.cutsitee.org/pdf/Unpacking_the_Bali_PackageA_Snapshot_of_the_Bali_Ministerial_Decisions_of_the_WTO_Members.pdf. (Accessed September 17, 2020).

ekspor tersebut termasuk dalam kuota yang telah ditentukan serta diberitahukan oleh negara pengimpor.¹² Pada kompetisi ekspor dalam Paket Bali 2013 menjadi prioritas sebagai bagian dari program kerja pasca diselenggarakannya Paket Bali 2013 untuk meningkatkan transparansi dan pemantauan terkait subsidi ekspor. Negara India terlibat aktif dalam Paket Bali 2013 untuk dapat melindungi keamanan pangan negara India.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak negara India mengalami krisis pangan dan bencana kekeringan besar, maka diperlukan kebijakan keamanan pangan agar dapat mengatasi permasalahan pangan. Negara India berfokus pada bidang agrikultur dan melalui WTO negara India bersama dengan negara berkembang yang lainnya mengajukan beberapa kesepakatan agar dapat melindungi keamanan pangan negara India. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana kebijakan luar negeri India terkait regulasi WTO (Paket Bali 2013) dalam melindungi keamanan pangan negara India?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu untuk

¹² Teddy Y. Soobramanien & Stephen Fevrier. "The Bali Package—A Breath of Fresh Air to the Doha Round. 2014. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz5m7qc2kd3-en.pdf?expires=1609057484&id=id&accname=guest&checksum=472B7602245586AE29051171AF678007> (Accessed September 17, 2020).

menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri India terkait dengan regulasi WTO pada Paket Bali 2013 dapat melindungi keamanan pangan negara India.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kebijakan negara India dalam menghadapi krisis pangan melalui regulasi di WTO. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk diteliti kembali di kemudian hari dalam hubungan internasional.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Level Of Analysis

Level of analysis dalam hubungan internasional digunakan sebagai metode untuk meneliti suatu fenomena. Menurut David Singer, *level of analysis* dapat dijabarkan melalui dua cara, yaitu dari sistem internasional dan sub-sistem nasional.¹³ Namun terdapat beberapa persyaratan dalam menentukan level of analysis yang tepat yaitu melalui gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), serta perkiraan (*prediction*). Hal ini agar dapat memudahkan

¹³ J. David Singer. *World Politics*. The International System : Theoretical Essays Vol. 14, No. 1. 1961, Hal. 77-92.

penelitian untuk dapat menentukan cara yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang terjadi.

Dalam hubungan internasional, *level of analysis* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tingkat analisis individu, tingkat analisis negara, dan tingkat analisis sistem. Tingkat analisis individu berdasarkan pandangan bahwa pembuatan kebijakan dapat dilakukan oleh individu (suatu kelompok, ras, dan lainnya).¹⁴ Hal ini dapat ditentukan dari proses pembuatan kebijakan dengan meneliti bagaimana individu tersebut membuat keputusan. Untuk dapat menganalisis tingkat individu dapat melalui keadaan alami individu tersebut, organisasi yang diikuti, serta melalui pendekatan *idiosyncratic*.

Tingkat analisis negara diasumsikan bahwa negara merupakan aktor internasional penting, maka dari itu untuk dapat memahami suatu kebijakan dengan berfokus pada bagaimana suatu kebijakan dipengaruhi oleh struktur politik negara tersebut, aktor-aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, serta interaksi antara aktor-aktor dan kebijakan tersebut.¹⁵ Proses pembuatan kebijakan ditentukan dari beberapa variabel seperti sistem politiknya, situasi yang terjadi, isu-isu yang berkembang, serta faktor-faktor internal dalam negara tersebut. Sedangkan tingkat analisis sistem yaitu menganalisis bagaimana suatu realita dalam sistem internasional mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Faktor-faktor level analisis sistem yang menentukan termasuk dari karakteristik struktural,

¹⁴ John T. Rourke. *Chapter 3 : Level of Analysis and Foreign Policy* dalam *International Politics on The World Stage*. New York McGraw-Hill International Edition. 2009.

¹⁵ *Ibid.*

hubungan yang kuat antar negara, realita ekonomi yang terjadi, serta tingkah laku dalam sistem internasional.

Maka dalam penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara karena dalam melindungi keamanan pangan, negara India bersama dengan negara-negara berkembang lainnya mengusulkan untuk mengubah regulasi yang ada pada WTO. Beberapa aturan dalam WTO di bidang pertanian dapat melindungi keamanan pangan negara India. Hal ini mengingat bahwa negara India sempat mengalami krisis pangan dan peningkatan harga pangan sehingga diperlukan kebijakan di bidang agrikultur untuk dapat menangani permasalahan pangan ini.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Food Security

Definisi umum dari *food security* yaitu semua orang mendapatkan akses makanan yang cukup dan tepat setiap saat untuk memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk memelihara hidup yang aktif dan sehat.¹⁶ Konsep *food security* dengan demikian menyangkut resiko kekurangan nutrisi pada tingkat makro maupun mikro yang dapat mengancam kesehatan fisik seseorang. Fokus *food security* sampai akhir tahun 1970-an lebih banyak diarahkan pada tingkat nasional dan internasional, terkait dengan kemampuan negara untuk

¹⁶ Christopher B. Barrett. *Food Security and Food Assistance Programs*. Handbook of Agricultural Economics 2, 2002 : 2103-2190.

mengamankan persediaan pangan yang cukup.¹⁷ Amartya Sen menjelaskan bahwa kelaparan terjadi bukan karena jumlah pangan yang tidak cukup, melainkan karena banyak orang tidak memiliki akses makanan yang cukup.¹⁸

Terdapat empat pilar pada *food security* yaitu ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*).¹⁹ Pada ketersediaan pangan berkaitan dengan penyediaan pangan melalui proses produksi, distribusi, dan pertukaran yang ditentukan oleh berbagai faktor termasuk kepemilikan dan penggunaan tanah, pengelolaan tanah, pemilihan jenis tanaman, pemeliharaan serta manajemen (termasuk pembibitan, pengelolaan ternak, dan panen). Pada akses pangan mengacu pada keterjangkauan dan alokasi pangan serta preferensi individu dan rumah tangga. Terdapat dua jenis akses terhadap pangan yaitu akses langsung di mana rumah tangga memproduksi makanan dengan menggunakan sumber daya manusia dan material serta akses ekonomi di mana rumah tangga membeli makanan yang diproduksi di tempat lain.

Selanjutnya yaitu pemanfaatan pangan yang mengacu pada metabolisme makanan yang dirasakan oleh setiap individu ketika makanan diperoleh dari suatu rumah tangga, berbagai faktor mempengaruhi kuantitas dan kualitas makanan yang menjangkau anggota rumah tangga.²⁰ Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan untuk memperoleh pangan dari waktu ke waktu, karena dalam

¹⁷ Helen Young, et al. *Food-Security Assessments in Emergencies : a Livelihoods Approach*. Overseas Development Institute, 2001. <https://www.files.ethz.ch/isn/96840/networkpaper036.pdf> (Accessed December 18, 2020). Hal. 3.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ G. L. Parvathamma. *An Assessment on Food Security in Developing Economies-Problems and Policy Initiatives*. IOSR J. Econ. Financ 6, 2015 : 01-10.

²⁰ *Ibid.*

beberapa kondisi seperti cuaca atau hilangnya mata pencarian menyebabkan penurunan ketersediaan pangan. Kelaparan merupakan akar dari terjadinya *food insecurity*. Dengan memastikan tercapainya pilar dalam keamanan pangan maka dapat mencegah terjadinya *food insecurity*.

1.5.2.2 Rational Actor Model

Sebagai bagian bidang dari hubungan internasional, analisis kebijakan luar negeri mencerminkan asumsi realisme klasik menjadi teori analitik yang dikenal dengan *rational actor model*.²¹ Menurut Allison pada teori *rational actor model* menjelaskan bahwa hasil kebijakan luar negeri atau suatu peristiwa ini harus kontras dengan studi tentang proses kebijakan luar negeri. Peristiwa yang dimaksud oleh Hudson yaitu terdiri dari apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Dalam teori ini yaitu kebenaran diasumsikan bahwa pilihan dibuat dengan cara yang rasional dan tindakan itu merupakan hasil perhitungan yang cermat dalam cara tersebut.

Menurut Heywood terdapat empat tahapan prosedur analisis kebijakan luar negeri yang berdasarkan *rational actor model* yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan.²² Kedua, preferensi kebijakan luar negeri yang diharapkan harus diberi peringkat secara teratur. Ketiga, penilaian menyeluruh terhadap konsekuensi dari pilihan yang tersedia harus dilakukan. Keempat, pilihan

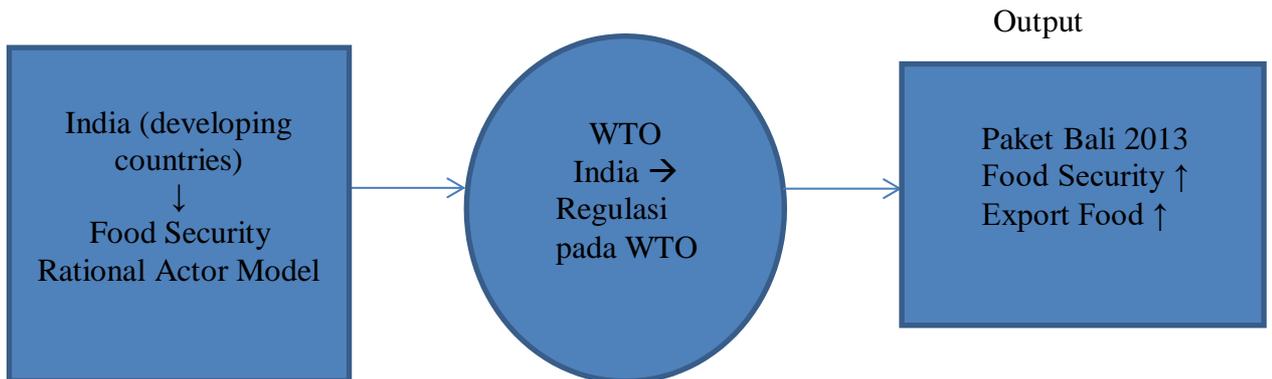
²¹ Sadra Shahryarifar. *A Defence on the Prominence of Rational Actor Model within Foreign Policy Analysis*. 2016. http://webmail.khazar.org/bitstream/20.500.12323/3349/1/YEN-_2_Volume19number1.7.IR-pub-.pdf (Accessed January 25, 2021) .

²² *Ibid.*

rasional haruslah yang mencerminkan konsekuensi yang paling disukai antara tujuan-tujuan yang diberi peringkat.

Aktor rasional diharapkan mampu mengidentifikasi segala alternatif dan konsekuensi untuk memilih dari segala alternatif yang ada untuk mencapai keinginan yang maksimal.²³ Menurut Renshon secara umum proses analitik model rasional harus mengarah pada keputusan yang lebih baik meskipun hasil yang didapat tidak selalu lebih baik. Dalam *rational actor model*, *game theory* merupakan metode yang dapat membantu untuk memahami pengambilan keputusan. *Game theory* dapat membantu untuk menempatkan pilihan menjadi strategi karena memungkinkan untuk melihat bagaimana keputusan aktor bergantung pada perilaku aktor lain di masa lalu.

1.6 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 : Sintesa Pemikiran

²³ A. Mintz & K. DeRouen Jr. 2010. *The Rational Actor Model*. Understanding Foreign Policy Decision Making, 57–67.

Dari skema kerangka pemikiran yang dipaparkan diatas bahwa negara India bersama dengan negara-negara berkembang lainnya memiliki kepentingan untuk dapat melindungi keamanan pangan sehingga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan masing-masing. Di samping itu juga didasari oleh keadaan negara India yang mengalami krisis pangan maka dari itu perlu adanya kebijakan di bidang agrikultur untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Keamanan pangan dalam suatu negara diperlukan agar masyarakat dalam negara tersebut dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Dengan kebutuhan dan stok pangan yang cukup maka suatu negara dapat memenuhi kebutuhan ekonomi negara tersebut. Melalui WTO negara India bersama dengan negara berkembang lainnya mengusulkan untuk mengubah beberapa kebijakan dalam WTO dalam Paket Bali 2013. Dengan adanya perubahan beberapa aturan dalam WTO, negara India dapat meningkatkan keamanan pangan serta kegiatan ekspor pangan dapat meningkat secara signifikan. Selain itu perubahan beberapa aturan dalam WTO untuk kepentingan negara-negara berkembang khususnya negara India.

1.7 Hipotesa

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran sebelumnya, permasalahan krisis pangan yang dialami oleh negara India memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan negara India untuk dapat melindungi keamanan pangan . Melalui beberapa putaran dalam WTO terutama pada Paket Bali 2013, negara-negara berkembang khususnya negara India dapat mengubah beberapa peraturan agar sesuai dengan kepentingan negara India. Peraturan Pertanian yang ada pada

Paket Bali 2013 dalam WTO memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan pangan negara India sehingga permasalahan krisis pangan negara India dapat teratasi. Selain itu, dapat memudahkan negara India untuk dapat mengekspor produk agrikultur yang menjadi andalan negara India. Maka dari itu hipotesis yang dapat diambil yaitu latar belakang kebijakan luar negeri India terhadap keamanan pangan negara India dalam regulasi WTO, yaitu dalam Paket Bali 2013.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.8.1.1 Food Insecurity

Food insecurity terjadi setiap kali ketersediaan makanan yang cukup bergizi maupun kemampuan untuk memperoleh makanan secara pribadi mengalami keterbatasan atau tidak pasti.²⁴ Penggunaan *food insecurity* dapat membatasi kata “lapar” yang dalam kamus berarti rasa tidak nyaman yang disebabkan karena kekurangan pangan. Berbeda dengan kelaparan yang diasosiasikan dengan individu, *food insecurity* dapat dikarakteristikan dengan negara, komunitas, rumah tangga, maupun individu. Pada pendekatan mata pencaharian, *food insecurity* diukur dari dampaknya pada kemampuan masyarakat

²⁴ Cathy C. Campbell. Food Insecurity : A Nutritional Outcome Or A Predictor Variable?. The Journal of Nutrition 121.3. (1991): 408-415.

untuk membeli makanan dalam jangka pendek serta dampaknya terhadap mata pencaharian dan swasembada pangan pada jangka panjang.²⁵

Bentuk paling parah yang dialami dalam *food insecurity* yaitu dalam ranah sosial yaitu ketidakpastian individu mendapatkan makanan dengan cara yang dapat diterima serta masyarakat yang tidak cukup makan sebagai akibat dari sumber daya yang tidak mencukupi fisik dan psikologis yang berkonsekuensi pada kelaparan.²⁶ Dalam penelitian ini, *food insecurity* dapat terjadi di suatu negara terutama pada negara India disebabkan karena beberapa pilar dalam food security yang tidak tercapai dan terlaksana dengan baik.

1.8.1.2 Ekspor

Menurut Cavusgil dan Nevin, ekspor dapat didefinisikan secara konseptual sebagai keputusan dan aktivitas internasional yang terkait dengan pemasaran dan aktivitas perusahaan yang aktif secara internasional.²⁷ Eksportir juga termasuk perusahaan manufaktur yang mengatur produksi dan distribusi barang ke luar negeri serta perantara yang memiliki spesialisasi dalam distribusi barang di pasar internasional. Ekspor merupakan barang dan jasa yang diproduksi di satu negara dan dibeli oleh perusahaan maupun masyarakat di negara lain.²⁸ Ekspor dapat

²⁵ Helen Young, et al. *Op. Cit.* Hal. 4.

²⁶ Edward A. Frongillo Jr. *Validation of Measures of Food Insecurity and Hunger*. The Journal of nutrition 129.2 (1999): 506S-509S.

²⁷ Aviv Shoham. *Export Performance : A Conceptualization and Empirical Assessment*. Journal of international marketing, 6.3 (1998): 59-81.
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1069031X9800600308> (Accessed December 21, 2020).

²⁸ Amadeo Kimberly. *Exports and Their Effect on the Economy*. 2020.
<https://www.thebalance.com/exports-definition-examples-effect-on-economy-3305838> (Accessed December 21, 2020).

dilakukan ketika suatu perusahaan memiliki produk maupun jasa yang lebih baik daripada perusahaan di negara lain.

Ekspor memiliki beberapa manfaat yaitu dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan upah yang lebih tinggi, serta meningkatkan standar hidup penduduk.²⁹ Bagi negara, ekspor dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Dalam penelitian ini, ekspor yang dimaksud yaitu kegiatan produksi dan distribusi produk agrikultur negara India ke negara lain.

1&13 Game Theory

Menurut Mastin J. Osborne, dalam ruang lingkup yang lebih besar bahwa permainan dapat dikatakan sebagai aktivitas kompetitif yang bertujuan untuk membantu memahami situasi di mana para pemain saling bersaing satu sama lain dalam pengambilan keputusan sesuai dengan seperangkat aturan.³⁰ *Game theory* dapat diterapkan pada permasalahan-permasalahan seperti perusahaan yang bersaing dalam bisnis, kandidat politik yang bersaing untuk mendapatkan suara terbanyak, anggota juri memberi keputusan, dan lain sebagainya. *Game theory*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Martin J. Osborne. *An Introduction to Game Theory*. Vol. 3. No. 3. New York: Oxford University Press, 2004.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/32188651/An_Introduction_to_Game_Theory.pdf?1383077017=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAn_Introduction_to_Game_Theory.pdf&Expires=1612090904&Signature=ExdijHnWusfveLf~IkdIvtqdzos~wDFZH6F9H96MXyB4gfB43M5PQ8GQL3LWkq~Emjmp~Ay3mXonVc2zmk0y3HMSGXcoltbJOaB0E834XQ5RQtE5oLEu-843wXL154C97xCAy3vfio7lutXCqjiFFLD3AnncDpiajU3EV-NdRbi-NLmks0N1dAkaK7saL~BV3RE6S5vZv9qiTez5DrQvDeI4QK9FPM4hC55KXqzLxXFbOwldmHVJoCY3BF4-GnxTDDvIyfFMNu7tYdqDI-iICFGekqEjrJ0mCVVMiLHX95ADJER-Q4JzsBiydtJp0hH0rcM0~-dmaVQq35Q18Hg_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA (Accessed January 25, 2021).

dapat didefinisikan sebagai studi tentang model konflik matematika dan kerjasama antara pembuat keputusan rasional yang cerdas.³¹ *Game theory* memberikan teknik matematika umum untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih individu membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan satu sama lain. Dengan demikian *game theory* menawarkan cara yang sangat penting bagi para praktisi di semua cabang ilmu pengetahuan sosial untuk dapat mengambil keputusan praktis.

Dalam penelitian ini, permasalahan krisis pangan di negara India memberikan pengaruh pada negara India dalam menentukan kebijakan luar negerinya dalam bidang agrikultur. Melalui organisasi WTO, negara India berupaya agar dapat melindungi keamanan pangan negara India sendiri. Dengan kewenangan dan hak yang didapat oleh negara India terhadap WTO sehingga hal ini memudahkan negara India untuk menentukan kebijakan yang dapat melindungi keamanan pangan negara India sendiri.

1.8.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain.³² Penelitian

³¹ Roger B. Myerson. *Game Theory*. Harvard University Press, 2013.
<http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/8302/1/Game%20Theory%20Analysis%20of%20Conflict%20by%20Roger%20B.%20Myerson.pdf> (Accessed January 25, 2021).

³² Siyoto, Sandu, & Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015. Hal. 8.

deskriptif memiliki karakteristik yang dibatasi pada keadaan faktual suatu fenomena dan tidak ada penjelasan mengapa suatu fenomena tersebut dapat terjadi.³³ Dalam penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk membentuk hipotesis maupun membangun teori, maka dari itu karakteristik lain dari penelitian deskriptif yaitu bersifat obyektivitas atau netral.

1.8.3 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian terdapat jangkauan ruang dan jangkauan waktu. Jangkauan ruang dalam penelitian ini yaitu negara India, organisasi internasional WTO (World Trade Organization) serta negara-negara lain yang terkena dampak dari Peraturan Pertanian. Jangkauan waktu dalam penelitian ini terhitung dari sebelum Paket Bali 2013 ini digelar hingga tahun 2017. Jangkauan waktu ditentukan dari kebijakan agrikultur dalam WTO mulai diterapkan pada negara-negara hingga beberapa putaran dilaksanakan, terutama setelah Paket Bali 2013 ini selesai diselenggarakan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang terpenting dalam penelitian yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat

³³ Wendelien Lans & D. J. M. van der Voordt. *Descriptive Research. Ways To Study and Research Urban, Architectural and Technical Design.* 2002.
<https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:3585713f-1be1-4321-82f3-44888b70371a>
(Accessed January 22, 2021)

terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.³⁴ Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.³⁵ Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau orang lain. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu menggunakan studi pustaka (sumber data sekunder) dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, situs resmi pemerintah, maupun berita-berita yang akurat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam teknis analisis data terdapat dua macam yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisa data yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal.³⁶ Sedangkan dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam serta dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif.

³⁴ Siyoto, Sandu, & Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015. Hal. 75.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung. 2009. Hal. 224.

³⁶ *Ibid.* Hal. 243.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁷ Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah selanjutnya yaitu melakukan reduksi data dengan melakukan abstraksi. Abstraksi yaitu usaha untuk membuat rangkuman inti, proses, maupun pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya yaitu menyusunnya dalam satuan-satuan. Tahap akhir dari analisis data yaitu memeriksa keabsahan data.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika tersusun dalam empat bab utama yaitu :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, definisi operasional dan konseptual, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan susunan data-data pendukung yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai data-data keamanan pangan negara India. Data-data tersebut meliputi kegiatan ekspor pangan negara India sehingga negara India memiliki kebijakan luar negeri dalam melindungi keamanan pangan negara India.

BAB III merupakan susunan data-data pendukung yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana peraturan dalam bidang

³⁷ Moleong, Lexy J. Moleong Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2004. Hlm. 247.

agrikultur pada Paket Bali 2013 dalam WTO dapat memberikan dampak pada negara-negara yang terlibat di dalamnya, umumnya negara-negara berkembang dan khususnya negara India.

BAB IV merupakan kesimpulan dalam penelitian. Kesimpulan ini merupakan keseluruhan dari penelitian ini yang terdiri dari BAB I hingga BAB III, mulai dari latar belakang masalah hingga pembahasan yang didasarkan pada kerangka pemikiran.